

**Framing Murray Edelman dalam Pemberitaan Konflik Tambang Karst Karawang di Suarana.com sebagai Representasi Kuasa Simbolik**

***Framing Murray Edelman in the Karawang Karst Mining Conflict Reporting on Suarana.com as a Representation of Symbolic Power***

Nisrina Tiara Balqis<sup>1</sup>, Hendra Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
E-mail: 2210631080078@student.unsika.ac.id<sup>1</sup>

Artikel Info	ABSTRAK
Diterima: 15 Juni 2025 Disetujui: 24 September 2025 Diterbitkan: 25 September 2025  <b>Hal. 88-101</b>	Konflik tambang karst di Karawang melibatkan benturan kepentingan antara perusahaan tambang dan masyarakat yang terdampak, serta menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Suarana.com membingkai konflik tersebut menggunakan model <i>framing</i> Murray Edelman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan pendekatan naratif, serta teknik <i>purposive sampling</i> pada berita Suarana.com periode Februari dan April 2025. Data dianalisis menggunakan empat elemen <i>framing</i> terdiri dari kategorisasi, ideologi, rubrik, dan klasifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suarana.com membingkai isu secara kritis dan berpihak pada keadilan ekologis dengan menonjolkan suara warga, dugaan manipulasi izin, serta lemahnya tanggapan pemerintah. Pemberitaan media ini mencerminkan bagaimana konstruksi simbolik digunakan untuk membentuk opini publik terhadap konflik lingkungan yang terjadi.
<b>Kata Kunci:</b>  <i>Framing; Media; Karst; Konflik Tambang; Murray Edelman.</i>	
<b>Keywords:</b>  <i>Framing; Media; Karst; Mining Conflict; Murray Edelman.</i>	<b>ABSTRACT</b>  <i>The karst mining conflict in Karawang involves a clash of interests between mining companies and affected communities, and has become a public concern because it concerns environmental sustainability. This study aims to analyze how Suarana.com frames the conflict using Murray Edelman's framing model. This study uses a qualitative method with a constructivist paradigm and narrative approach, as well as a purposive sampling technique on Suarana.com news for the period February and April 2025. Data were analyzed using four framing elements consisting of categorization, ideology, rubric, and classification. The results of the study show that Suarana.com frames the issue critically and sides with ecological justice by highlighting the voices of residents, allegations of permit manipulation, and the weak response of the government. This media coverage reflects how symbolic construction is used to shape public opinion on the environmental conflict that occurs.</i>

## PENDAHULUAN

Isu konflik tambang karst di Karawang semakin mendapatkan perhatian publik melalui berbagai saluran media, termasuk Suarana.com. Konflik ini melibatkan sejumlah pihak dengan kepentingan yang saling bertentangan terkait eksploitasi sumber daya alam di kawasan karst, yang memiliki nilai ekologis dan sosial yang signifikan. Pemberitaan yang muncul tidak hanya menyajikan fakta-fakta objektif, tetapi juga disusun sedemikian rupa untuk membentuk persepsi dan opini publik yang spesifik terhadap para aktor yang terlibat.

Menurut Israq (2016: 2) Karst merupakan bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan batuan karbonat, seperti kapur dan dolomit, oleh air. Kawasan karst memiliki potensi istimewa serta berbagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Karst dikenal memiliki karakteristik hidrologi yang khas karena batuannya mudah larut dan memiliki porositas sekunder yang berkembang dengan baik.

Selain itu, wilayah karst juga dicirikan oleh bentuk permukaan dan sistem drainase yang unik akibat tingginya tingkat keterlarutan batuan terhadap air. Muhjad dalam (Israq, 2016: 2) juga menyebutkan bahwa pemberian izin di wilayah bentang alam karst berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap upaya pembangunan berkelanjutan. Dampak negatif yang mungkin terjadi meliputi kerusakan lingkungan, hilangnya habitat alami, menurunnya kualitas air tanah, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di kawasan karst.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang menyeluruh terhadap konsekuensi dari pemberian izin di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) sebelum memulai kegiatan pembangunan. Upaya mitigasi dan konservasi juga harus dilaksanakan agar izin yang diberikan tidak merusak ekosistem karst serta tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Media suarana.com membingkai isu penambangan di Kawasan Karst Karawang secara kritis, menyoroti dugaan manipulasi izin oleh PT MPB serta dampak ekologis dari aktivitas tambang.

Suara warga dan aktivis lingkungan diangkat sebagai bentuk perlawanan terhadap kerusakan lingkungan dan ketidakadilan, sementara aksi protes digambarkan sebagai respons terhadap sikap perusahaan dan pemerintah yang dianggap abai. Penambangan diposisikan sebagai ancaman serius bagi ekosistem dan sumber air, menunjukkan keberpihakan media ini pada perlindungan lingkungan dan aspirasi masyarakat lokal. Pemberitaan tersebut akan dianalisis menggunakan model *framing* Murray Edelman, yang menekankan bagaimana media membentuk persepsi publik melalui simbol, narasi, dan konstruksi makna politik, untuk melihat bagaimana suarana.com merepresentasikan konflik tambang sebagai isu ketimpangan kekuasaan dan perjuangan atas keadilan ekologis.

Menurut Murray Edelman dalam (Eriyanto, 2002: 155) menjelaskan bahwa apa yang kita pahami tentang realitas sangat dipengaruhi oleh cara kita membingkai, membentuk, dan menafsirkan realitas tersebut. Satu peristiwa yang sama dapat dimaknai secara berbeda tergantung pada bagaimana ia dikonstruksi. Perbedaan dalam melihat dan mengaplikasikan suatu kejadian sering kali muncul karena sudut pandang atau bingkai yang digunakan oleh individu.

Hal serupa juga terjadi dalam dunia media, di mana satu peristiwa yang sama dapat disampaikan dengan cara yang berbeda oleh media yang berbeda, karena proses pemberitaan telah melalui konstruksi subjektif dari wartawan atau redaktur yang mengemas informasi tersebut. Fathurrahman dalam (Nabila, 2020: 151-152) menyatakan analisis teks berita dengan model Murray Edelman, mengajukan empat metode di antaranya kategorisasi, ideologi, rubrik, dan klasifikasi. Kategorisasi adalah cara memahami realitas melalui sudut pandang tertentu dengan memilih kata-kata yang membentuk makna suatu peristiwa.

Ideologi mengacu pada bagaimana pembingkai media mencerminkan pandangan, kepentingan, atau keyakinan suatu kelompok, yang dapat memengaruhi persepsi publik. Rubrik berperan dalam mengelompokkan berita ke dalam tema tertentu, sehingga memengaruhi cara audiens menafsirkan relevansi isi berita. Sementara itu, klasifikasi menentukan bagaimana suatu informasi disajikan agar membentuk sikap publik, baik mendukung maupun menolak, dengan membangkitkan emosi dan tanggapan terhadap isu yang disampaikan.

Keempat konsep ini saling berhubungan dalam membentuk cara media menyusun dan menyampaikan realitas kepada masyarakat. Menurut Ibad (2016: 526) analisis *framing* adalah metode yang digunakan untuk menelaah bagaimana media membingkai suatu realitas, baik berupa peristiwa, individu, maupun kelompok. Senada dengan itu, bagi Damayanti *et al.*, (2016: 3929) analisis *framing* didefinisikan sebagai salah satu model analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan cara media menyajikan dan membingkai fakta.

Selain itu, analisis *framing* juga kini telah berkembang menjadi suatu kerangka teori yang digunakan oleh para ahli komunikasi sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana pesan dalam teks media dibentuk oleh struktur atau kepentingan di baliknya (Flora, 2014: 351). Dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis *framing* adalah pendekatan untuk memahami bagaimana media membingkai realitas melalui penyajian fakta yang dipengaruhi oleh kepentingan dan konstruksi tertentu. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi merupakan kajian yang relevan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan model teori *framing* Murray Edelman sebagai pendekatan analisis. Penelitian pertama dilakukan oleh Adelia Shinta Dwita, Gunawan Wisnu Pramudya, dan Ade Irma Sukmawati (2023) yang berjudul “Analisis Framing Murray Edelman Dalam Berita “Dampak PT. Medco Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang” Pada Media AJNN.net”. Penelitian ini menyoroti bagaimana media lokal membingkai dampak aktivitas perusahaan tambang terhadap masyarakat sekitar. Penelitian kedua oleh Aryadi (2014) berjudul “Framing Analysis In Media Television News MetroTVOne Related Arrest by the Chairman MK Akil Mocktar Commission Case of Corruption” berfokus pada bagaimana televisi nasional membingkai kasus korupsi pejabat tinggi.

Sementara itu, penelitian ketiga oleh Nida Asyfiatul Hasna (2024) yang berjudul “Konstruksi media “CNN Indonesia” dan “Republika” perspektif Murray Jacob Edelman” membandingkan konstruksi berita dua media nasional terhadap isu tertentu. Ketiga studi tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan teori Edelman sebagai pisau analisis, namun berbeda dalam topik yang diangkat serta jenis media yang dianalisis, mulai dari media lokal, televisi, hingga media daring nasional. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah yaitu bagaimana Suarana.com membingkai isu konflik tambang karst di Karawang dengan menggunakan pendekatan analisis *framing* model Murray Edelman.

Penelitian ini penting karena konflik tambang di kawasan karst menyangkut kepentingan lingkungan dan masyarakat, sehingga perlu dilihat bagaimana media membentuk cara pandang publik terhadap isu ini. Adapun tujuan dari penelitian ini dianalisis untuk mengetahui cara Suarana.com menyusun pemberitaan melalui empat elemen *framing* Edelman, yaitu kategorisasi, ideologi, rubrik, dan klasifikasi. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman kritis terhadap cara media menyampaikan informasi, terutama dalam isu-isu yang menyangkut keadilan ekologis dan sosial. Penelitian ini nantinya akan bermanfaat untuk memberikan wawasan bagi masyarakat lebih kritis terhadap berita yang dikonsumsi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi media dalam menyajikan informasi secara lebih berimbang dan bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN

Menurut Aisah & Sukenti dalam (Dwita *et al.*, 2023: 90) penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis yang dilakukan melalui analisis unsur intrinsik sebagai bagian dari nilai kelayakan berita, yang mencakup kejelasan mengenai peristiwa yang disampaikan. Menurut Moleong dalam (Paramitha & Karim, 2022: 379), penelitian kualitatif berfokus pada penggunaan kata-kata sehingga peneliti dapat menguraikan hasil temuan secara rinci dan menyeluruh. Sedangkan, Suparlan dalam (Dwita *et al.*, 2023: 91) menyatakan bahwa paradigma konstruktivis adalah suatu teori yang bersifat membangun, baik dalam hal kemampuan, pemahaman, maupun proses pembelajaran.

Paradigma ini melihat realitas sosial bukan sebagai sesuatu yang alami, melainkan sebagai hasil dari proses konstruksi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik

*purposive sampling* dan studi pustaka. Menurut Sugiyono dalam (Aryadi, 2014: 61) teknik *purposive sampling* merupakan metode pemilihan sumber data berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.

*Sampling* yang digunakan berupa teks pemberitaan berbasis *online* Suarana.com periode 17 Februari 2025 dan 17 April 2025 dengan fokus analisis konflik sosial akibat kebijakan perizinan tambang di kawasan karst yang berdampak pada lingkungan dan respon masyarakat. Kemudian, mengenai studi pustaka, teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pemahaman dan telaah terhadap berbagai teori dari literatur yang relevan dengan topik penelitian (Adlini *et al.*, 2022: 2). Analisis data pada penelitian ini menggunakan *framing* Murray Edelman melalui tahapan kategorisasi, ideologi, rubrik, dan klasifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suarana.com membingkai konflik tambang karst Karawang dengan pendekatan yang kritis dan berpihak pada isu keadilan ekologis. Pemberitaan tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk persepsi publik melalui konstruksi narasi tertentu. Langkah awal dalam proses analisis dimulai dengan analisis intrinsik. Pada tahap ini, kajian difokuskan pada struktur internal berita, meliputi susunan berita, kelengkapan informasi, tingkat kedetailan, kesinambungan antar bagian (koherensi), gaya kalimat, penggunaan kata ganti, pilihan diksi (leksikon), elemen visual (grafis), serta penggunaan metafora. Berikut berita yang akan dianalisis:

### Analisis Intrinsik Berita 1

Judul : PT MPB Berstatus UKM, MKB Sebut Upaya Manipulasi  
Sumber : <https://www.suarana.com/2025/02/pt-mpb-berstatus-ukm-mkb-tuduh-ada.html>

**Tabel 1.** Analisis Intrinsik Berita 1

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
Sintaksis	<i>Headline</i>	PT MPB Berstatus UKM, MKB Sebut Upaya Manipulasi
	<i>Lead</i>	PT Mas Putih Belitung (MPB) mengakui bahwa izin usaha yang diajukannya berstatus Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan nilai investasi di bawah Rp5 miliar. Namun, Masyarakat Karawang Bersatu (MKB) menilai hal tersebut sebagai upaya manipulasi perizinan agar dapat lolos dengan status UKM, meskipun usaha tambang tersebut diduga berskala besar.  Hal ini terungkap dalam audiensi antara MKB dan Komisi IV DPRD Jawa Barat pada Kamis (27/2/2025).
	Latar	Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PT MPB menyampaikan status izin usahanya di hadapan Ketua Komisi IV DPRD Jabar Rizaldy Priambodo serta anggota komisi, Pipik Taufik Ismail (Fraksi PDI-P) dan Jenal Arifin (Fraksi Partai Demokrat).
	Kutipan	1. Presidium MKB, Yudi Wibiksana, menegaskan adanya dugaan manipulasi izin yang dilakukan PT MPB. Menurutnya, usaha pertambangan bukanlah usaha kecil karena memiliki eksploitasi dalam skala besar. "Kita tahu sendiri kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

		<p>dengan terdakwa Bupati Karawang nonaktif, Ade Swara, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung pada Selasa (3/2/2015) lalu. Dalam sidang itu, Freddy, yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT JSI dan kini menjadi Dirut PT MPB, mengaku telah memberikan uang sebesar Rp4,8 miliar kepada istri Bupati Karawang, Nuriatifah, dan Rp1,2 miliar kepada Tono Bachtiar (alm.), mantan Ketua DPRD Karawang," ungkap Yudi usai audiensi.</p> <p>2. Selain itu, MKB juga menyoroti sikap Komisi IV DPRD Jabar yang dinilai seolah memfasilitasi PT MPB untuk memperbaiki atau meloloskan izin pertambangan. "Kami tegaskan, tidak ada niat untuk membiarkan Karst ditambang. Pencabutan IUP PT MPB adalah harga mati," tegas Yudi.</p> <p>3. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Rizaldy Priambodo, menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan antara MKB dan PT MPB terkait tata ruang perlu diselesaikan melalui jalur hukum. "Dari hasil audiensi, kita bisa melihat adanya perbedaan sudut pandang mengenai tata ruang. Oleh karena itu, ini perlu dibawa ke pengadilan," ujar Rizaldy.</p>
	Pernyataan	-
	Penutup	Audiensi ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas ESDM Jabar, DLHK Jabar, BMPR Jabar, DPMPTSP Jabar, serta pihak PT MPB.
Scrip	Who	PT Mas Putih Belitung (MPB), Masyarakat Karawang Bersatu (MKB), Komisi IV DPRD Jawa Barat, Freddy sebagai Dirut MPB (dulu Dirut PT JSI), Ade Swara (mantan Bupati Karawang, terdakwa TPPU), Nuriatifah dan Tono Bachtiar, pihak yang disebut menerima uang Instansi teknis: ESDM Jabar, DLHK Jabar, DPMPTSP Jabar, BMPR Jabar.
	What	PT Mas Putih Belitung (MPB) mengakui bahwa izin usaha yang diajukannya berstatus Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan nilai investasi di bawah Rp5 miliar.
	Why	PT MPB dituding mengelabui proses perizinan dengan mengaku sebagai UKM untuk mendapatkan izin lebih mudah, padahal kegiatan tambang berskala besar dan berdampak pada kawasan lindung. MKB menilai ini sebagai bentuk pelanggaran tata ruang dan ancaman terhadap lingkungan karst.
	When	Audiensi berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025 dan kasus korupsi yang dikaitkan terjadi pada 3 Februari 2015 (sidang Tipikor Bandung).
	Where	Kantor Komisi IV DPRD Jawa Barat

	<i>How</i>	Konflik berkembang melalui audiensi formal dengan DPRD yang mengungkap dugaan manipulasi, rekam jejak korupsi, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap legislatif yang dianggap memfasilitasi perizinan tambang. MKB menuntut pencabutan IUP sebagai harga mati, sementara DPRD menyarankan penyelesaian hukum karena adanya perbedaan tafsir tata ruang.
Tematik	Detail koherensi bentuk kalimat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dugaan manipulasi izin usaha tambang oleh PT MPB</li> <li>2. Penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang di kawasan karst</li> <li>3. Respons lembaga legislatif dan tuntutan penyelesaian melalui jalur hukum</li> </ol>
Retoris	Leksikon	Manipulasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP)
	Grafis	-
	Foto	PT MPB Berstatus UKM, MKB Sebut Upaya Manipulasi. Sumber: Suarana.com

Sumber: Dwita *et al.*, (2023: 92)

## 2. Analisis Intrinsik Berita 2

Judul : Tak Digubris Sehari, Demontran Jebol Gerbang dan Bakar Pos PT JSI  
Sumber : <https://www.suarana.com/2025/04/tak-digubris-seharian-demonstran-jebol.html>

**Tabel 2.** Analisis Intrinsik Berita 2

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Tak Digubris Sehari, Demontran Jebol Gerbang dan Bakar Pos PT JSI
	<i>Lead</i>	Aksi unjuk rasa gabungan warga dan aktivis lingkungan di depan area PT Jui Shin Indonesia (JSI), Kecamatan Pangkalan, Karawang, berujung ricuh, Kamis (17/4/2025). Kekecewaan massa memuncak setelah tidak satu pun perwakilan perusahaan keluar menemui mereka. Situasi memanasi hingga gerbang pabrik dirusak dan pos satpam dibakar.
	Latar	Demonstrasi ini merupakan bagian dari protes terhadap aktivitas penambangan batu kapur di kawasan Karst Pangkalan yang dilakukan oleh PT Mas Putih Belitung. Warga menilai, PT JSI yang memproduksi semen merupakan pihak yang menerima hasil eksploitasi tambang tersebut, sehingga dianggap turut bertanggung jawab. Advertisement
	Kutipan	Salah satu peserta aksi, Ruwog, menyampaikan bahwa tindakan pembakaran bukan dilakukan tanpa sebab.



		“Kami sudah menunggu sejak pagi, tidak ada respons sama sekali. Ini bentuk kekecewaan kami atas sikap diam perusahaan. Kami ingin keadilan, bukan sekadar membuat keributan,” tegasnya Kamis (17/04/2024).
	Pernyataan	Warga menilai, PT JSI yang memproduksi semen merupakan pihak yang menerima hasil eksploitasi tambang tersebut, sehingga dianggap turut bertanggung jawab. Advertisement
	Penutup	Aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari gelombang protes yang sudah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Warga dan aktivis mengancam akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar jika tidak ada tanggapan dari perusahaan maupun pemerintah daerah terkait tuntutan penghentian aktivitas eksploitasi di wilayah Karst Pangkalan.
Scrip	Who	Warga dan aktivis lingkungan Karawang, PT Jui Shin Indonesia (JSI), PT Mas Putih Belitung (MPB), pihak kepolisian, Ruwog.
	What	Terjadi aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan, termasuk merusak gerbang dan pembakaran pos satpam, sebagai bentuk protes terhadap aktivitas pertambangan batu kapur di kawasan karst.
	Why	Warga dan aktivis kecewa terhadap tidak adanya tanggapan dari perusahaan terhadap protes tambang, dugaan keterlibatan PT JSI dalam menerima hasil tambang dari kawasan karst, dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.
	When	Aksi terjadi pada Kamis, 17 April 2025, dan berlangsung hingga siang hari.
	Where	Di depan area pabrik PT JSI, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
	How	Unjuk rasa awalnya berlangsung damai, namun memanaskan karena perusahaan tidak merespons massa sama sekali. Aksi kemudian berubah menjadi ricuh dengan merusak fasilitas pabrik, diiringi penjagaan ketat polisi. Massa tetap bertahan sambil menyuarakan tuntutan dialog dan mengancam akan menggelar aksi lanjutan.
Tematik	Detail koherensi bentuk kalimat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan dialog kepada PT JSI oleh warga dan aktivis lingkungan.</li> <li>2. Kemarahan akibat pembiaran eksploitasi karst oleh PT MPB.</li> <li>3. Kericuhan aksi sebagai ekspresi frustrasi terhadap sikap diam perusahaan.</li> </ol>

Retoris	Leksikon	Ricuh, Eksploitasi
	Grafis	-
	Foto	Protes Eksploitasi Karst, Massa Ancam Aksi Lebih Besar Jika PT JSI Tak Respons. Sumber: Suarana.com

Sumber: Dwita *et al.*, (2023: 92)

### 3. Analisis Intrinsik Berita 3

Judul : Bentang Karst Terancam, Warga Karawang Rusuh Tolak Tambang Kapur  
Sumber : <https://www.suarana.com/2025/04/bentang-karst-terancam-warga-karawang.html>

**Tabel 3.** Analisis Intrinsik Berita 3

Elemen	Unit	Strategi Penulisan
Sintaksis	<i>Headline</i>	Bentang Karst Terancam, Warga Karawang Rusuh Tolak Tambang Kapur
	<i>Lead</i>	Kegelisahan mendalam menyelimuti warga Karawang Selatan. Di tengah kegundahan atas masa depan lingkungan mereka, ratusan warga memutuskan turun ke jalan. Mereka bukan sekadar berdemo—mereka berteriak demi kehidupan yang lebih lestari.  Aksi unjuk rasa menolak aktivitas tambang kapur di kawasan Pegunungan Karawang Selatan, Kamis (17/4/2025), berubah menjadi kericuhan. Sejumlah massa memaksa masuk ke area pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru. Situasi memanaskan saat pos Satpam dan beberapa fasilitas lainnya dibakar di depan gerbang pabrik.
	Latar	Aksi tersebut merupakan respons keras atas terbitnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemprov Jawa Barat pada Januari 2024. Lokasi tambang berada di kawasan yang dikenal sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Pangkalan—wilayah yang memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air dan habitat satwa.
	Kutipan	1. Ujang Nurali, salah seorang tokoh masyarakat setempat, menegaskan bahwa penambangan batu kapur di daerah tersebut sangat membahayakan ekosistem. "Apa jadinya jika batu kapur di wilayah kami dikeruk. Bisa-bisa kami kekurangan air saat kemarau, dan banjir saat musim hujan," ucapnya. 2. Ia menyayangkan langkah Pemprov yang dinilai gegabah dalam menerbitkan izin, tanpa kajian mendalam di lapangan. "Yang menandatangani adalah Pj Gubernur



		<p>Jabar, Bey Machmudin. Diduga atas rekomendasi Bupati Karawang sebelumnya," lanjut Ujang.</p> <p>3. Ruwog, peserta aksi lainnya, menyampaikan bahwa pembakaran pos Satpam bukanlah tindakan anarkis semata, melainkan bentuk kekecewaan mendalam terhadap sikap perusahaan yang tutup mata.</p> <p>"Sejak pagi tidak satu pun perwakilan perusahaan menemui kami. Kami bukan ingin membuat onar, kami hanya menuntut keadilan," ujarnya.</p> <p>4. Menanggapi hal ini, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyurati Gubernur Jawa Barat untuk meninjau ulang WIUP dan IUP.</p> <p>"Ya, kami sudah sampaikan surat kepada Gubernur Dedi Mulyadi. Isinya meminta agar izin tersebut ditinjau kembali karena berkaitan dengan perlindungan kawasan lindung," kata Aep.</p>
	Pernyataan	<p>1. Warga mendesak Gubernur Jawa Barat saat ini, Dedi Mulyadi, untuk mencabut izin tersebut dan memulihkan fungsi ekologis kawasan.</p> <p>2. Massa juga mendesak Bupati Karawang untuk hadir langsung di tengah aksi. Bagi mereka, kehadiran kepala daerah adalah simbol keberpihakan kepada rakyat.</p>
	Penutup	<p>Di tengah situasi memanas, aparat kepolisian berjaga ketat untuk mengantisipasi kericuhan yang lebih luas. Upaya mediasi dilakukan guna menjaga kondusivitas dan mencegah massa memasuki kawasan industri.</p>
Scrip	Who	<p>Warga Karawang Selatan dan aktivis lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perusahaan tambang batu kapur, tokoh masyarakat seperti Ujang Nurali dan Ruwog, Bupati Karawang, Pj Gubernur Jabar sebelumnya yaitu Bey Machmudin, aparat kepolisian.</p>
	What	<p>Terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung kericuhan, termasuk pembakaran pos satpam, sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan tambang batu kapur di kawasan karst yang telah diberi izin oleh pemerintah provinsi.</p>
	Why	<p>Terbitnya izin tambang (WIUP dan IUP) di wilayah karst yang memiliki fungsi ekologis penting, kekhawatiran akan kerusakan lingkungan seperti kekurangan air dan banjir, kekecewaan atas sikap diam perusahaan dan kebijakan pemerintah yang dianggap gegabah, tuntutan untuk mencabut izin dan memulihkan kawasan lindung.</p>
	When	<p>Aksi berlangsung pada Kamis, 17 April 2025 dan merupakan respons terhadap izin tambang yang diterbitkan pada Januari 2024.</p>

	<i>Where</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru, Kabupaten Karawang.</li> <li>2. Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Pangkalan, yang merupakan wilayah tambang dan lokasi aksi.</li> </ol>
	<i>How</i>	Aksi dimulai dengan damai, namun, memanas saat massa tidak direspons oleh perusahaan, lalu berujung pembakaran pos satpam. Kemudian, Aparat berjaga ketat dan mencoba melakukan mediasi. Warga mendesak pejabat hadir langsung dan meminta izin dicabut oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Di sisi lain, pemerintah daerah merespons dengan mengirim surat ke gubernur untuk peninjauan ulang izin.
Tematik	Detail koherensi bentuk kalimat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan pencabutan izin tambang kapur di Karst Karawang Selatan.</li> <li>2. Kekecewaan atas sikap diam perusahaan tambang.</li> <li>3. Bahaya ekologis penambangan terhadap kehidupan warga.</li> </ol>
Retoris	Leksikon	Kegelisahan, Eksploitasi, Kericuhan
	Grafis	-
	Foto	Protes Tambang Kapur di Karawang, Warga Desak Izin Cabut. Sumber: Suarana.com

Sumber: Dwita *et al.*, (2023: 92)

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis *framing* menggunakan model Murray Edelman untuk mengidentifikasi elemen kategorisasi, ideologi, rubrik, dan klasifikasi.

### Kategorisasi

#### a. Kategorisasi dalam berita *PT MPB Berstatus UKM, MKB Sebut Upaya Manipulasi*

Kategorisasi dari berita ini menunjukkan ketegangan antara PT Mas Putih Belitung (MPB) dan Masyarakat Karawang Bersatu (MKB) terkait status izin usaha yang diajukan PT MPB. Penggunaan frasa “upaya manipulasi perizinan” mencerminkan perspektif media yang menyoroti dugaan ketidakberesan dalam proses perizinan. MKB menilai bahwa usaha tambang tersebut seharusnya tidak dikategorikan sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM) karena skalanya yang besar.

Pernyataan Yudi Wibiksana dari MKB yang mengaitkan dugaan manipulasi izin dengan kasus hukum sebelumnya memperkuat narasi bahwa ada masalah serius dalam pengelolaan izin. Sikap Komisi IV DPRD Jabar yang dianggap memfasilitasi PT MPB juga menjadi sorotan, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Yudi menegaskan pencabutan IUP PT MPB sebagai “harga mati,” sementara Rizaldy Priambodo, Ketua Komisi IV, menyatakan perlunya penyelesaian melalui jalur hukum. Berita ini mencerminkan kompleksitas konflik antara kepentingan bisnis dan perlindungan masyarakat serta lingkungan.

#### b. Kategorisasi dalam berita *Tak Digubris Seharian, Demonstran Jebol Gerbang dan Bakar Pos PT JSI*

Kategorisasi dari berita ini menunjukkan ketegangan antara warga dan aktivis lingkungan dengan PT Jui Shin Indonesia (JSI) terkait aktivitas penambangan batu kapur di

kawasan Karst Pangkalan. Penggunaan frasa “berujung ricuh” mencerminkan situasi yang semakin memanas setelah tidak ada perwakilan perusahaan yang menemui massa, yang menyebabkan kerusakan pada gerbang pabrik dan pembakaran pos satpam. Warga menilai PT JSI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas eksploitasi tambang, sehingga mereka merasa berhak untuk menyuarakan kekecewaan. Pernyataan Ruwog, salah satu peserta aksi, menegaskan bahwa tindakan pembakaran merupakan respons terhadap ketidakpedulian perusahaan. Pihak kepolisian berusaha menjaga situasi agar tidak semakin memburuk, sementara massa tetap bertahan dengan tuntutan untuk berdialog. Aksi ini merupakan kelanjutan dari protes sebelumnya, dengan ancaman aksi yang lebih besar jika tidak ada tanggapan dari perusahaan atau pemerintah daerah. Berita ini mencerminkan konflik antara kepentingan perusahaan dan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan lingkungan.

**c. Kategorisasi dalam berita *Bentang Karst Terancam, Warga Karawang Rusuh Tolak Tambang Kapur***

Kategorisasi dari berita ini menggambarkan ketegangan antara masyarakat Karawang Selatan dan pemerintah serta perusahaan terkait aktivitas penambangan kapur, dengan kata-kata seperti "kegelisahan mendalam" dan "aksi unjuk rasa" menyoroti dampak negatif penambangan terhadap lingkungan dan kehidupan warga. Masyarakat merasa terancam oleh izin yang dikeluarkan Pemprov Jawa Barat, yang dianggap membahayakan ekosistem, seperti diungkapkan oleh tokoh masyarakat Ujang Nurali. Tindakan pembakaran pos Satpam oleh peserta aksi, yang dinyatakan sebagai bentuk kekecewaan, menunjukkan bahwa mereka berjuang untuk keadilan dan perlindungan lingkungan. Media berusaha menonjolkan suara masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

**Ideologi**

**a. Ideologi dalam berita *PT MPB Berstatus UKM, MKB Sebut Upaya Manipulasi***

Ideologi yang terkandung dalam berita ini mencerminkan perjuangan masyarakat untuk keadilan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kalimat "Pencabutan IUP PT MPB adalah harga mati" menunjukkan tekad masyarakat, dalam hal ini Masyarakat Karawang Bersatu (MKB), untuk menolak praktik manipulasi perizinan yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat. Dugaan manipulasi izin usaha oleh PT Mas Putih Belitung, yang dinilai tidak sesuai dengan skala usaha yang sebenarnya, mencerminkan kekhawatiran akan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pernyataan Yudi Wibiksana tentang keterlibatan pejabat dalam kasus korupsi menegaskan pentingnya akuntabilitas dan integritas dalam proses perizinan.

**b. Ideologi dalam berita *Tak Digubris Sehari, Demonstran Jebol Gerbang dan Bakar Pos PT JSI***

Ideologi yang terkandung dalam berita ini terlihat pada kalimat, "Kami ingin keadilan, bukan sekadar membuat keributan," yang menegaskan bahwa masyarakat berjuang untuk hak mereka atas lingkungan yang lebih baik dan menuntut tanggung jawab dari perusahaan. Kalimat ini mencerminkan semangat kolektif warga yang tidak hanya ingin menyuarakan ketidakpuasan mereka, tetapi juga berupaya untuk menciptakan perubahan yang positif dalam pengelolaan sumber daya alam.

**c. Ideologi dalam berita *Bentang Karst Terancam, Warga Karawang Rusuh Tolak Tambang Kapur***

Ideologi yang terkandung dalam berita ini mencerminkan perjuangan masyarakat untuk melindungi lingkungan dan hak-hak mereka atas sumber daya alam. Kalimat "Kami bukan ingin membuat onar, kami hanya menuntut keadilan" menunjukkan bahwa warga beraksi untuk memperjuangkan keberlanjutan ekosistem dan perlindungan daerah resapan

air. Pernyataan Ujang Nurali tentang bahaya penambangan dan desakan kepada pemerintah untuk mencabut izin tambang menegaskan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan.

#### **Rubrik**

**a. Rubrik dalam berita *PT MPB Berstatus UKM, MKB Sebut Upaya Manipulasi***

Berita ini masuk ke dalam rubrik hukum dan lingkungan, mengungkapkan audiensi antara Masyarakat Karawang Bersatu (MKB) dan Komisi IV DPRD Jawa Barat terkait status izin usaha PT Mas Putih Belitung (MPB) yang dianggap sebagai manipulasi perizinan. MKB menilai bahwa meskipun PT MPB mengklaim berstatus Usaha Kecil Menengah (UKM), usaha tambang tersebut seharusnya tidak termasuk dalam kategori tersebut karena skala eksploitasi yang besar. Audiensi ini juga menyoroti dugaan keterlibatan korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan menegaskan tuntutan MKB untuk mencabut izin usaha PT MPB.

**b. Rubrik dalam berita *Tak Digubris Sehari, Demonstran Jebol Gerbang dan Bakar Pos PT JSI***

Berita ini masuk ke dalam rubrik sosial dan lingkungan, melaporkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga dan aktivis lingkungan di depan PT Jui Shin Indonesia (JSI) sebagai protes terhadap aktivitas penambangan batu kapur oleh PT Mas Putih Belitung. Situasi ini menunjukkan ketegangan antara masyarakat dan perusahaan, serta perlunya perhatian dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada.

**c. Rubrik dalam berita *Bentang Karst Terancam, Warga Karawang Rusuh Tolak Tambang Kapur***

Berita ini masuk ke dalam rubrik sosial dan lingkungan, menggambarkan aksi unjuk rasa ratusan warga Karawang Selatan yang merasa terancam oleh aktivitas penambangan batu kapur oleh PT Mas Putih Belitung. Tindakan ini mencerminkan frustrasi mendalam warga yang menuntut keadilan dan dialog dengan perusahaan, menunjukkan bahwa masalah lingkungan dan sosial saling terkait dan memerlukan perhatian serius dari pihak perusahaan serta pemerintah daerah.

#### **Klasifikasi**

**a. Klasifikasi dalam berita *PT MPB Berstatus UKM, MKB Sebut Upaya Manipulasi***

Klasifikasi dalam berita ini terletak pada pernyataan Masyarakat Karawang Bersatu (MKB) yang menilai bahwa pengakuan PT Mas Putih Belitung (MPB) mengenai status izin usaha sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan upaya manipulasi perizinan. Dalam audiensi dengan Komisi IV DPRD Jawa Barat, MKB menegaskan bahwa usaha tambang tersebut seharusnya tidak dikategorikan sebagai UKM karena skala eksploitasi yang besar. Pernyataan ini menimbulkan dua spekulasi di kalangan publik, ada yang mendukung klaim MKB tentang manipulasi izin dan ada pula yang meragukannya, mengingat PT MPB beroperasi di sektor yang berpotensi merugikan lingkungan. Selain itu, sikap Komisi IV DPRD Jabar yang dianggap memfasilitasi PT MPB juga menambah ketegangan, menciptakan pandangan negatif terhadap lembaga tersebut. Dengan demikian, berita ini membangkitkan emosi dan tanggapan publik terhadap isu perizinan dan tanggung jawab lingkungan yang dihadapi oleh PT MPB.

**b. Klasifikasi dalam berita *Tak Digubris Sehari, Demonstran Jebol Gerbang dan Bakar Pos PT JSI***

Klasifikasi dalam berita mengenai aksi unjuk rasa di depan PT Jui Shin Indonesia (JSI) terlihat jelas melalui penyajian informasi yang membangkitkan emosi kekecewaan dan kemarahan dari massa, yang merasa diabaikan oleh perusahaan. Tindakan pembakaran yang dilakukan peserta aksi, seperti yang dinyatakan oleh Ruwog, mencerminkan frustrasi mendalam terhadap ketidakresponsifan perusahaan, menciptakan spekulasi kontras di

kalangan pembaca antara dukungan terhadap perjuangan keadilan lingkungan dan penilaian negatif terhadap tindakan anarkis. Ketiadaan respons dari pihak perusahaan dan ancaman aksi lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi menambah ketegangan, sementara konteks yang lebih luas mengenai eksploitasi sumber daya alam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi di balik protes tersebut, sehingga membentuk sikap publik yang beragam.

**c. Klasifikasi dalam berita *Bentang Karst Terancam, Warga Karawang Rusuh Tolak Tambang Kapur***

Klasifikasi dalam berita mengenai aksi unjuk rasa warga Karawang Selatan, terdapat unsur klasifikasi yang jelas terlihat, yaitu kegelisahan mendalam warga terhadap dampak lingkungan dari aktivitas tambang kapur. *Framing* ini membangkitkan emosi publik, menciptakan narasi tentang perjuangan masyarakat melawan kekuatan yang dianggap merugikan mereka, serta menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menerbitkan izin tambang yang dianggap gegabah. Aksi unjuk rasa yang berubah menjadi keributan, termasuk pembakaran pos Satpam, diungkapkan sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap sikap perusahaan dan pemerintah yang dinilai tutup mata. Warga menuntut keadilan dan kehadiran pemimpin mereka sebagai simbol keberpihakan, yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan dan tanggung jawab sosial pemerintah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Suarana.com membingkai konflik tambang karst Karawang melalui pendekatan kritis yang berpihak pada isu keadilan ekologis. Media ini menggunakan strategi pemberitaan yang menonjolkan suara masyarakat dan aktivis lingkungan, serta menyoroti ketimpangan kekuasaan dalam proses perizinan tambang. Dengan menggunakan model *framing* Murray Edelman, ditemukan bahwa elemen kategorisasi, ideologi, rubrik, dan klasifikasi disusun secara sistematis untuk memperkuat narasi perjuangan masyarakat melawan praktik eksploitasi yang dianggap tidak adil dan merusak lingkungan. Pemberitaan ini menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap isu lingkungan, terutama melalui pemilihan diksi dan penyusunan struktur narasi yang mendukung agenda tertentu. Suarana.com secara simbolik merepresentasikan perlawanan terhadap kekuasaan ekonomi dan politik yang dianggap merugikan masyarakat serta lingkungan.

Sebagai saran, peneliti menyarankan agar media massa tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dan akurasi dalam menyampaikan informasi, khususnya pada isu-isu yang menyangkut kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji representasi konflik sumber daya alam di media yang berbeda dengan pendekatan komparatif, agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai keberpihakan dan strategi *framing* media dalam membentuk opini publik.

## REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aryadi, A. (2014). *Framing Analysis In Media Television News MetroTVOne Related Arrest by the Chairman MK Akil Mocktar Commission Case of Corruption*. *Jurnal The Messenger*, 6(2), 58-65. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v6i2.193>
- Damayanti, S., Mayangsari, I. D., & Putra, D. K. S. (2016). Analisis framing robert n. Entman atas pemberitaan reklamasi teluk jakarta di majalah tempo. *eProceedings of Management*, 3(3). Diakses pada 15 Juni 2025, jam 01.18 WIB dari <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/3785/0>
- Dwita, A. S., Pramudya, G. W., & Sukmawati, A. I. (2023). Analisis *Framing* Murray Edelman

- dalam Berita “Dampak PT. Medco Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang” Pada Media AJNN.net. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi*, 7(2), 88-101. <https://doi.org/10.56873/jimik.v7i2.290>
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKiS Group.
- Flora, E. (2014). Analisis framing berita calon Presiden RI 2014-2015 pada surat kabar Kaltim Pos dan Tribun Kaltim. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2(3), 347-356. Diakses pada 15 Juni 2025, jam 01.03 WIB dari [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/jurnal%20elina%20flora%20ok%20\(08-27-14-03-33-14\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/jurnal%20elina%20flora%20ok%20(08-27-14-03-33-14).pdf)
- Hasna, N. A. (2024). Konstruksi media “CNN Indonesia” dan “Republika” perspektif Murray Jacob Edelman. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(6), 414-419. Diakses pada 15 Juni 2025, jam 01.05 WIB dari <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/9057>
- Ibad, K. (2016). Analisis Framing Berita Banjir oleh Humas di Website Pemerintah Kota Samarinda". *eJournal Ilmu Komunikasi*. 4(3): 520-534. Diakses pada 15 Juni, 2025, jam 01.16 WIB dari [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/eJournal%20KHOIRUL%20IBAD%20UPLOAD%20\(FIX\)%20\(08-29-16-04-10-02\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/eJournal%20KHOIRUL%20IBAD%20UPLOAD%20(FIX)%20(08-29-16-04-10-02).pdf)
- Israq, M. (2016). Izin Tambang PT. Kobexindo Cement di Kawasan Karst: Tantangan Hukum dan Implikasinya bagi Lingkungan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1). Diakses pada 15 Juni 2025, jam 01.07 WIB dari <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/251>
- Nabila, M. (2021). Indonesia COVID-19 task force statement *framing* in September–November 2020. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 6(1), 149-160. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v6i1.505>
- Paramitha, G. A., & Karim, A. A. (2022). Analisis Framing Berita Penembakan Jurnalis AS di Ukraina pada CNNIndonesia. com dan Sindonesws. com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 376-383. <https://doi.org/10.5281/zenodo.65>